

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12
TAHUN 2023**



**bank nbp
pt bpr nbp 12**

**Jl. Raya Puspitek No. 39 Kota Tangerang Selatan, Banten
TELEPON: 021-7561275**



BAB I

PENJELASAN UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 12 atau biasa disingkat menjadi PT. BPR NBP 12 adalah perusahaan jasa keuangan perbankan yang telah berdiri sejak tanggal 12 Oktober 1992, berdasarkan pengesahaan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-7024 HT.01.01.Th.1992, dan izin untuk menjalankan usaha sebagai BPR yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-047/KM.17/1992.

PT. BPR NBP 12 mempunyai komitmen "Bersama Anda Membangun Usaha", sesuai dengan komitmen tersebut PT. BPR NBP 12 siap melayani pinjaman untuk Pengusaha Kecil dan Menengah dalam membangun usaha, demi tercapainya kesejahteraan ekonomi bagi nasabah, debitur, karyawan, serta pemilik perusahaan.

Visi

Menjadi BPR Terbesar di wilayah Tangerang Selatan

Misi

Memberikan pelayanan unggul yang menyentuh kebutuhan nasabah dengan cepat dan tepat sasaran

Mengembangkan produk dan jasa perbankan yang kompetitif dan berbasis teknologi

Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional

Sinergi yang kuat dengan Lembaga keuangan lain, Lembaga pendidikan dan pihak swasta

Memberikan kontribusi terbaik kepada kesejahteraan nasabah, karyawan dan pemilik



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	MELKY ROMA TUA SINAGA
	NIK	:	3175092610760002
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring, pemantauan, melaksanakan penghimpunan dana BPR 2. Memberikan keputusan atas pemberian kredit BPR dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian 3. Bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha BPR 4. melaksanakan dan menjalankan hasil temuan audit baik rekomendasi dari pelaksana audit intern, ektern, komisari. otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya 5. Mencapai target sesuai dengan RBB tahun 2023 			
2.	Nama	:	LEO
	NIK	:	3173040504890001
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR 2. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 4. menetapkan sistem dan produser kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 5. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan 7. memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain 8. memberikan rekomendasi untuk produk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai dengan ketentuan baik ketentuan intern dan ekstern 9. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR 10. menganalisis mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkan secara efektif dan efisien 12. melakukan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan POJK dan peraturan perundang-undangan 			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat action tindak lanjut penyelesaian NPL 2. Memonitoring APU PPT 3. Menetapkan risk tolerance terhadap produk kredit di wilayahnya untuk langkah mitigasi 4. Meminta untuk menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan ekstern 5. Terjadinya turn over yang tinggi pada marketing dengan beberapa faktor terutama tidak tercapainya target, maka diharapkan direksi dapat mencari sumber permasalahan yang ada, serta untuk SDM baru wajib diberikan pelatihan dan pendidikan secara baik pada awal periode kerja dari setiap marketing baru agar dapat menguasai bidang pekerjaannya dengan baik 6. Memaksimalkan melakukan penawaran atas pelayanan pembayaran tagihan, transfer antar bank maupun pembelian transaksi 			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN
	NIK	:	3174010608810001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Tidak mengambil keputusan terhadap operasional BPR kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur pemberian kredit 5. memastikan direksi melakukan tindak lanjut dari hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit Ekstern, hasil pengawasab dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya 		
2.	Nama	:	HENDRAWAN AGUS
	NIK	:	3275060412600002
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Tidak mengambil keputusan terhadap operasional BPR kecuali mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur pemberian kredit 5. memastikan direksi melakukan tindak lanjut dari hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit Ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lainnya 		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat action tindak lanjut penyelesaian NPL 2. Memonitoring APU PPT 3. Menetapkan risk tolerance terhadap produk kredit di wilayahnya untuk langkah mitigasi 4. Meminta untuk menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan ekstern 5. Terjadinya turn over yang tinggi pada marketing dengan beberapa faktor terutama tidak tercapainya target, maka diharapkan direksi dapat mencari sumber permasalahan yang ada, serta untuk SDM baru wajib diberikan pelatihan dan pendidikan secara baik pada awal periode kerja dari setiap marketing baru agar dapat menguasai bidang pekerjaannya dengan baik 6. Memaksimalkan melakukan penawaran atas pelayanan pembayaran tagihan, transfer antar bank maupun pembelian transaksi 			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
Tugas dan Tanggung Jawab :	



	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR NBP 12 memiliki modal inti dibawah 15 milyar maka tidak memiliki komite audit intern, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tindak lanjut rekomendasi struktur keanggotaan, keahlian dan idependensi anggota komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
formulir program kerja dan realisasi kerja komite tahun 2021 tidak ada			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	Rp0	0%
2.	LEO	3173040504890001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
direksi tidak memiliki saham di bpr nbp 12 dan di perusahaan lain				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	-	-	0%
2.	LEO	3173040504890001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LEO	3173040504890001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	MELKY ROMA TUA SINAGA	3175092610760002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	LEO	3173040504890001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					



TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA DARI ANGGOTA DIREKSI

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	Rp0	0%
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	Rp226.800	8.4%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
1. Komisaris Utama tidak memiliki saham di BPR NBP 12				
2. Komisaris memiliki saham dengan jumlah sebesar Rp. 226.800.000,- atau sebesar 8.40%				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	-	-	0%
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
TIDAK ADA					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR					



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp704.140.000	2	Rp284.620.000
2.	Tunjangan	2	Rp144.920.000	2	Rp130.550.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp849.060.000		Rp415.170.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Data diatas sesuai dengan keputusan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	PERUMAHAN (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	GOLD VIP (6)	GOLD VIP (8)
4.	Fasilitas Lainnya	ASURANSI JIWA (2)	ASURANSI JIWA (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pengurus memperoleh fasilitas asuransi kesehatan dan asuransi jiwa			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.76 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.98 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
gaji ini dihitung dihitung selama tahun 2023	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Februari 2023	3	1. Pembahasan notulen rapat sebelumnya 2. Pembahasan mengenai debitur inti NPL 3. Laporan temuan IC 4. Pembahasan APU PPT
2.	30 Maret 2023	3	1. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya 2. Pembahasan mengenai debitur inti NPL 3. Pembahasan mengenai APU PPT
3.	16 Juni 2023	3	1. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya 2. Pembahasan mengenai debitur inti NPL 3. Pembahasan mengenai perkembangan usaha bpr sampai dengan Mei 2023 4. Pembahasan mengenai APU PPT
4.	14 September 2023	3	1. Pembahasan mengenai Notulen sebelumnya 2. Pembahasan mengenai APU PPT 3. Pembahasan mengenai debitur inti NPL 4. Pembahasan mengenai Perkembangan Usaha BPR sampai dengan agustus 2023 5. Pembahasan hasil temuan IC 6. Pembahasan SDM
5.	05 Oktober 2023	3	1. Pembahasan notulen rapat sebelumnya 2. Pembahasan mengenai APU PPT 3. Pembahasan mengenai langkah - langkah yang akan dilakukan 4. Pembahasan mengenai perkembangan usaha BPR 5. Pembahasan SDM
6.	12 Desember 2023	3	1. Pembahasan mengenai APU PPT 2. Pembahasan mengenai Perkembangan Usaha BPR sampai dengan november 2023 3. Pembahasan mengenai debitur inti NPL 4. Pembahasan tentang rencana Write Off 5. Pembahasan tentang temuan IC



			6. Pembahasan mengenai langkah - langkah yang akan dilakukan 7. Pembahasan mengenai Strategi Bisnis th 2024 8. Pembahasan tentang rencana perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan 9. Perkembangan SDM
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam 1 tahun komisaris melaksanakan rapat 6 kali			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN	3174010608810001	2	4	100%
2.	HENDRAWAN AGUS	3275060412600002	2	4	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris selalu hadir dalam setiap rapat dewan komisaris ataupun rapat bersama Direksi					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
TIDAK ADA PENYIMPANGAN INTERNAL								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi pada tahun 2023		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
TIDAK ADA									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	19 Oktober 2023	Sosial	Memberikan sembako berupa beras, indomie, makanan ringan, sajadah, makanan dan uang tunai kepada lansia-lansia di panti jompo	Panti Jompo	Rp4.264.700
2.	07 Desember 2023	Sosial	ikut dalam kegiatan bantuan bencana alam di desa simangulampe disalurkan melalui PT NBP	Desa Simangulampe	Rp1.000.000
3.	08 Desember 2023	Sosial	Sumbangan acara perayaan natal BNKP jemaah tangsel	BNKP Jemaah Tangsel	Rp250.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2023 BPR NBP 12 telah melakukan 3 kali kegiatan sosial yang dananya diambil dari kewajiban lain cadangan puluhan					

Serpong, 18 Januari 2024

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12

Menyetujui



Melky Roma Tua Sinaga
Direktur Utama



Abraham Theo Pasabam Silaban
Komisaris Utama